

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan merupakan sekumpulan program yang secara khusus didesain untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Klungkung pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Bali demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah, yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional.

Guna terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah maka pembangunan daerah Kabupaten harus sejalan dengan Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global sebagaimana tercantum dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. PPSB adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara keaslian Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi Krama Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut :

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi Sekala Niskala

Pembangunan yang mengandung dimensi sekala dan niskala yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk, dan tuntunan Ida Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

Pemerintah Provinsi Bali harus membangun Kabupaten/Kota se-Bali, bukan membangun di Kabupaten/ Kota se-Bali secara parsial dengan

tujuan, sasaran, dan obyek yang berbeda antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Artinya, prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi harus sesuai dengan prioritas sektor yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali baik menyangkut tujuan, sasaran, dan obyek serta lokasi pembangunan.

Untuk itu, proses perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor harus dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali sehingga dapat ditentukan pola pembangunan yang dipakai dan skema penganggarannya; yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali. Dengan pendekatan demikian maka pembangunan Bali akan menjadi lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran.

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Provinsi harus lebih banyak berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator; bukan sebagai operator langsung, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bisa dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi dengan para pihak yang berorientasi pada efektivitas efisiensi, dan tepat sasaran serta mengedepankan kepentingan Bali secara keseluruhan. Sementara pembangunan Bali yang menjadi wilayah kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terintegrasi dan bersinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat lokus pembangunan tersebut berada di wilayah Kabupaten/Kota.

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

Sejalan dengan kepentingan tersebut, Gubernur Bali sebagai Kepala Pemerintahan di daerah dan perwakilan Pemerintah Pusat di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan pendekatan budaya, bukan mengedepankan kepemimpinan formalistik yang bersifat hirarki dan struktural dalam memimpin pembangunan Bali yang di dalamnya terdapat Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam membangun daerahnya.

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

Bali yang wilayahnya sangat kecil dan memiliki sumber daya sangat terbatas, maka pembangunan Bali harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah; satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

Pembangunan Bali dalam berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan, maka untuk menjawab adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang bersifat lokal, nasional, dan global diperlukan kepemimpinan yang lurus, lascarya, prinsipil, berani,

dan tegas. Bersikap lurus dalam mengambil posisi terutama terkait penegakkan peraturan perundang-undangan, kepemimpinan yang berani dalam *nindihin Gumi Bali*, guna menjaga dan memelihara *Genuine Bali*; termasuk kepemimpinan yang berani melakukan terobosan kebijakan baru terhadap segala upaya untuk memajukan Bali.

Berdasarkan pertimbangan pendekatan PPSB dan paradigma pembangunan Bali tersebut dan hasil evaluasi pencapaian target RKPD Tahun 2021, dapat diidentifikasi berbagai masalah pokok yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Berikut keterkaitan hasil evaluasi dan isu strategis yang dapat dirumuskan.

Tabel 4.1
Keterkaitan Hasil Evaluasi dan Isu Strategis Kabupaten Klungkung

| No | Hasil Evaluasi | Isu Strategis |
|----|--|--|
| 1 | Umur Harapan Hidup Kab. Klungkung tahun 2021 sebesar 71,41 tahun, berada di peringkat ke-7 di Provinsi Bali Harapan Lama Sekolah Kab. Klungkung tahun 2021 sebesar 13 tahun, masih di peringkat ke-6 di Provinsi Bali Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Klungkung Tahun 2021 sebesar 8,14 tahun, berada di peringkat ke-6 di Provinsi Bali | Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2021 sebesar 71,75, masih di bawah IPM Bali 75,69 (nomor 7 dari 9 kab/kota di Bali) |
| 2 | Persentase pengangguran pada Tahun 2021 mencapai 5,35%. | Produktivitas dan daya saing tenaga kerja lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Produktivitas tenaga kerja sektor industri, perdagangan dan pariwisata lebih rendah dari sektor-sektor produktif lain. |
| 3 | Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021 adalah 453,804 Km terdiri dari Jalan Kabupaten di Klungkung daratan sepanjang 224,797 Km dan Jalan Kabupaten di Klungkung Kepulauan sepanjang 229,007 Km. Untuk jalan kabupaten dalam kondisi mantap adalah sepanjang 398,575 Km (87,82%) terdiri dari panjang jalan kondisi baik sepanjang 347,393 Km dan kondisi sedang sepanjang 51,182 Km | Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2021 mencapai 76,55%. |
| 4 | Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m', dimana 2 Daerah Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (DI unda dan DI bajing) yang sebelumnya 1 DI (DI unda). Sehingga target jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum, | Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik Tahun 2021 baru mencapai 58,07%. |

| No | Hasil Evaluasi | Isu Strategis |
|----|--|---|
| | Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) per 31 Desember 2016 sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.114,00 m' (yang sebelumnya per 31 Desember 2015 sebanyak 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m'). Data per 31 Desember 2021 jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.459,00 m (terjadi penambahan panjang saluran pada DI. Cai dari saluran tersier menjadi saluran sekunder) dengan luas irigasi kabupaten 2.306,00 Ha. Untuk data kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sepanjang 54.852 dengan rasio jaringan irigasi baik sebesar 58,07%. | |
| 5 | Luas wilayah permukiman yang ada di Kabupaten Klungkung adalah 2.078,80 Ha, dimana sampai dengan Desember 2020 luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung mencapai 0,64% sehingga luas lingkungan permukiman layak huni adalah 1.867,14 Ha (89,82%). Untuk data jumlah seluruh rumah per 31 Desember 2021 di kabupaten Klungkung adalah 56.423 unit dengan rumah memenuhi syarat (rumah sehat/layak huni) sebanyak 52.688 unit (93,38 %) | Persentase rumah layak huni Tahun 2021 baru mencapai 93,38% |
| 6 | Kemiskinan Tahun 2021 sebesar 5,64%, lebih tinggi dari provinsi Bali sebesar 4,53%. | Kemiskinan di Kabupaten Klungkung tahun 2021 berada di peringkat ke-3 tertinggi di Provinsi Bali. |
| 7 | Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 0,67 pada tahun 2020 menjadi 0,82 pada tahun 2021. Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,17 tahun 2020 menjadi 0,25 pada tahun 2021. Rasio Gini tahun 2021 0,35 ke-2 tertinggi di Provinsi Bali. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 22,51% menjadi 22,77% pada tahun 2021. Kontribusi sektor akomodasi, makan dan minum (pariwisata) terhadap PDRB tahun 2020 sebesar 10,35% menjadi 8,81% pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi meningkat dari -6,38% pada tahun 2020 menjadi -0,23% pada tahun 2021 | Kesenjangan pendapatan penduduk akibat penurunan kontribusi sektor pariwisata diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian. |
| 8 | Hasil Evaluasi SAKIP belum mencapai target Persentase peringkat Daerah dengan SPIP masih di level 2 | Akuntabilitas Kinerja yang didukung <i>rewardpunishment</i> , pelayanan publik, SPIP, pengelolaan keuangan dan aset |

Setelah mensintesis isu strategis ini, kemudian diolah dan dianalisis untuk menjadi prioritas pembangunan tahun 2023, dengan hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2
Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

| | Isu Strategis | Prioritas Daerah |
|---|--|--|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2021 sebesar 71,75, masih di bawah IPM Bali 75,69 (nomor 7 dari 9 kab/kota di Bali) | Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia |
| 2 | Produktivitas dan daya saing tenaga kerja lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Produktivitas tenaga kerja sektor industri, perdagangan dan pariwisata lebih rendah dari sektor-sektor produktif lain. | |
| 3 | Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2021 mencapai 76,55%. | Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik |
| 4 | Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik Tahun 2021 baru mencapai 58,07%. | |
| 5 | Persentase rumah layak huni Tahun 2021 baru mencapai 93,38% | |
| 6 | Kemiskinan di Kabupaten Klungkung tahun 2021 berada di peringkat ke-3 tertinggi di Provinsi Bali. | Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat |
| 7 | Kesenjangan pendapatan penduduk akibat penurunan kontribusi sektor pariwisata diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor pertanian. | |
| 8 | Akuntabilitas Kinerja yang didukung <i>reward punishment</i> , pelayanan publik, SPIP, pengelolaan keuangan dan aset | Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif |

Keempat prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2023 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah baik urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan.

Selain mempertimbangkan paradigma pola pembangunan semesta berencana, disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan harapan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi yang harus ditingkatkan/diwujudkan agar tujuan tercapai.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, dan PP No.17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu, PP No. 17 Tahun 2017 juga mengamanatkan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) yang mengoptimalkan alokasi pendanaan untuk mendanai program-program prioritas.

Penyusunan RKP 2023 mengacu pada regulasi yang berlaku terutama dua regulasi di atas. Sebagai bentuk pendekatan Tematik, sudah dirumuskan tema pembangunan untuk tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema ini dijabarkan ke dalam 7 prioritas pembangunan nasional, yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkadilang.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Bali

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, maka prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2023 terdiri dari:

1. Pangan, Sandang dan Papan.
2. Pariwisata.
3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan.

4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya.
5. Penguatan Infrastruktur.
6. Kesehatan dan Pendidikan.
7. Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan Publik.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Prioritas pembangunan daerah, selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Bali. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung tahun 2023 terdiri dari:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia;
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2023 ini telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Bali sehingga terjalin sinergitas yang saling menguatkan. Sinergitas dan sinkronisasi prioritas pembangunan ini ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Arah Kebijakan Ekonomi dalam
Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Bali, dan Kabupaten Klungkung
Tahun 2023

| Prioritas Nasional | | Prioritas Provinsi | | Prioritas Daerah | |
|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|------------------|---|
| 1 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | P3 | Pangan, Sandang dan Papan | K3 | Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia |
| 2 | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | P2 | Kesehatan dan Pendidikan | K3 | Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik |
| 3 | Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing | P6 | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | K1 | Penanggulanprog. Keg rpjmdgan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat |
| 4 | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | P4 | Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya | K1 | Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif |
| 5 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung | P1 | Pariwisata | K3 | Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk |

| | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| | Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | | | | peningkatan kesejahteraan masyarakat |
| 6 | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | P5 | Penguatan Infrastruktur | K2 | Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik |
| 7 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | P7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | K4 | Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif |

4.2.4. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Hubungan antara prioritas daerah tahun 2023 dengan tujuan dan sasaran beserta target tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Hubungan antara Prioritas Daerah dengan Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2023

| No. | Prioritas Daerah | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja |
|-----|--|--|---------|--|--|
| | | | | | Tahun 2023 |
| 1 | Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia | Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah | | Cakupan Budaya yang lestari (%) | 82 |
| | | | | Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (tangible) dan tak benda (Intangible) | Jumlah Lestarnya Kebudayaan Benda(Tangible) dan tak benda (Intangible) |
| | | Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing | | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71,85 |
| | | | | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) |
| | | Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat | | Angka Rata-rata Lama Sekolah | 8,16 |
| | | | | Angka Harapan Lama Sekolah | 13,02 |
| | | Meningkatnya daya saing masyarakat | | Tingkat pengangguran Terbuka | 4,3-4,5 |
| 2 | Pembangunan infrastruktur | Mengurangi ketimpangan | | Indeks ketimpangan | 20,5 |

| No. | Prioritas Daerah | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja |
|-----------|---|---|--|--|----------------|
| | | | | | Tahun 2023 |
| | untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik | infrastruktur antar wilayah | | infrastruktur | |
| | | | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar | Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar | 69,49% |
| | | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | | Indeks kualitas lingkungan hidup (BPS) | 0 |
| | | | | Indeks kualitas lingkungan hidup (DLHP) | 64 |
| | | | Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara | Baku Mutu Air | 16 |
| 3 | Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat | Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023 | | Persentase Penduduk | 4,00-4,5 |
| | | | | Miskin | |
| | | | Meningkatnya kemandirian PMKS | Cakupan PMKS mandiri (PPKS Mandiri) | 47,65 |
| | | Meningkatnya Kesetaraan Gender | | Pengangguran Perempuan | 183 |
| | | | | Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan | 7,89 |
| | | | | Indeks Pemberdayaan Gender | 75,6 |
| | | | | Indeks Pembangunan Gender | 91,28 |
| | | | Terpenuhinya hak anak | Capaian peringkat penghargaan Kabupaten Layak anak | Nindya |
| | | Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri | | Persentase Desa berstatus swasembada | 53 |
| | | | | Indeks Desa Membangun (jumlah desa mandiri) | 53 |
| | | | Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang | Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1) | 98,86 |
| | | Mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun | | Laju Pertumbuhan PDRB | 4,5-5,0 |
| | | | Meningkatnya investasi daerah | PMA (US\$) | 600.000,00 |
| PMDN (Rp) | 200.000.000.000,00 | | | | |
| | | Kontribusi lapangan usaha | 8,44 | | |

| No. | Prioritas Daerah | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja |
|-----|---|--|--|--|--|
| | | | | | Tahun 2023 |
| | | | Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat | perdagangan terhadap PDRB (%) | 9,95 |
| | | | | Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%) | |
| | | | | Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%) | |
| | | | | Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah | Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.) |
| | | Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan | Skor PPH | 92 | |
| 4 | Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif | | Indeks reformasi birokrasi | 63,4 |
| | | | Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah | Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab | 70,38 |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Indeks Kualitas Pelayanan Publik | 4,51 |
| | | Terciptanya ketentraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap | | Indeks demokrasi indonesia (BPS) | 0 |
| | | | | Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung (Kesbang) | 83,5 |
| | | | Meningkatnya kesadaran berdemokrasi | Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel) | n/a |
| | | | Menurunnya potensi konflik | Angka Potensi Konflik sosial | 6 |
| | | | Menurunnya tingkat resiko bencana | Indeks Risiko Bencana (%) | 107,22 |
| | Meningkatnya ketaatan | Jumlah Pelanggaran Perda | | | |

| No. | Prioritas Daerah | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja |
|-----|------------------|--------|--|--|----------------|
| | | | | | Tahun 2023 |
| | | | masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan | Persentase perda dan perkara yang ditegakkan | 100% |

4.2.5. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 diarahkan dengan pelaksanaan program-program yang dapat menunjang pemulihan ekonomi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial
4. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
5. Program penanganan kerawanan pangan
6. Program pengawasan keamanan pangan
7. Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
8. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
9. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi
10. Program pendidikan dan latihan perkoperasian
11. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
12. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)
13. Program pengembangan umkm
14. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
15. Program pengembangan iklim penanaman modal
16. Program promosi penanaman modal
17. Program pelayanan penanaman modal
18. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
19. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
20. Program pengelolaan perikanan tangkap
21. Program pengelolaan perikanan budidaya
22. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
23. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
24. Program pemasaran pariwisata
25. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
26. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
27. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
28. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
29. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
30. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
31. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
32. Program penyuluhan pertanian

33. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
34. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan
35. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
36. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
37. Program pengembangan ekspor
38. Program standardisasi dan perlindungan konsumen
39. Program perencanaan dan pembangunan industri